



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR SAPTAHIDHAYAT**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **406901**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 670.182.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 670.182.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 364.000.000

1. MOTOR, YAMAHA GEAR 3 WAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.900.000
2. MOTOR, HONDA N1N02013L1AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.900.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 323.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.710.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 628.634.525

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.699.526.525

III. HUTANG Rp. 143.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.556.526.525

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.